

**PANDANGAN FIQH SIYASAH TEHADAP PERAN SENTRA PENEGAKAN
HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) DALAM PENANGANAN
PELANGGARAN TINDAK PIDANA KAMPANYE DI LUAR TAHAPAN
(Studi di Bawaslu Kota Bandar Lampung)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
guna mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah**

Oleh

**ROYIS SAPRINDO
NPM : 1621020310
Prodi: Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)**



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H/2020 M**

**PANDANGAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN SENTRA PENEGAKAN
HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) DALAM PENANGANAN
PELANGGARAN TINDAK PIDANA KAMPANYE DI LUAR TAHAPAN**
(Studi di Bawaslu Kota Bandar Lampung)

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah**



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2020**

ABSTRAK

Pemilihan Umum merupakan salah satu asas penyelenggara pemerintahan di Indonesia. Namun, secara implementasi demokrasi masih banyak kekurangan-kekurangan dalam setiap Pemilihan kepemimpinan, baik pemilihan tingkat kepala desa hingga pemilihan tingkat presiden. Dengan demikian terbitlah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam memberantas tindak pidana pemilu melalui pembentukan GAKKUMDU (penegakan hukum terpadu). Gakkumdu sebagai penegak hukum terpadu mempunyai peran yang sangat penting untuk memberantas tindak pidana pemilu, dalam Pasal ayat (11) UU No. 7 Tahun 2017 secara eksplisit dijelaskan bahwa pembentukan Gakkumdu untuk menyamakan pola pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu di Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) artinya penelitian ini dilakukan secara sistematis, teratur dan mendalam dengan mengangkat data atau fakta-fakta yang ada di lapangan. Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu sebagai badan tindak pidana Pemilu belum sesuai sebagaimana mestinya karena banyak hambatan-hambatan yang terjadi baik dari faktor internal maupun eksternal. Pandangan fiqh siyasah bahwa Sentra Penegakan hukum terpadu sebagai *wilayah al-hisbah* berwenang menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang terbukti melanggar syai'at. Hukuman itu dalam bentuk *ta'zir*, yaitu hukuman yang sepenuhnya kepada penegak hukum (*al-muhtasib*) untuk memilih hukuman yang sesuai bagi pelaku pelanggaran.

**SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Jurusan Siyasah Syar'iyah
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung menyampaikan

Bahwa:

Nama : Royis Saprindo

TTL : Tanjung Menang, 30 Maret 1997

NPM : 1621020310

Jurusan : Siyasah Syar'iyah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Pandangan Fiqh Siyasah terhadap Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Kampanye di luar Tahapan (Studi di Bawaslu Kota Bandar Lampung)** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun tiruan dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujukan dan disebut dalam karya *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 14 Desember 2020

Royis Saprindo
NPM. 1621020310



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarama Bandar Lampung Telp. (0721)703260

PERSETUJUAN

Judul : Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Kampanye di luar Tahapan (Studi di Bawaslu Kota Bandar Lampung)
Nama : Royis Saprimo
NPM : 1621020310
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Susiadi A.S., M. Sos.I.
NIP. 195808171993031002

Pembimbing II

H. Rohmat, S. Ag., M. H. I.
NIP. 197409202003121003

Ketua Jurusan

Frenki, M.Si.
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul (**Pandangan Fiqh Siyasah terhadap Peran Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Kampanye di luar Tahapan (Studi di Bawaslu Kota Bandar Lampung) Oleh Royis Saprindo NPM 1621020310** Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah), telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Rabu, 22 Juli 2020

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Frenki, M.Si

(.....)

Sekretaris : Erik R. Gumiri, M.H

(.....)

Penguji I : Dr Jayusman, M.Ag.

(.....)

Penguji II : Dr. Susiadi AS, M.Sos.I.

(.....)

Penguji III : H. Rohmat, S Ag., M.H.I

(.....)

**Dekan Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**

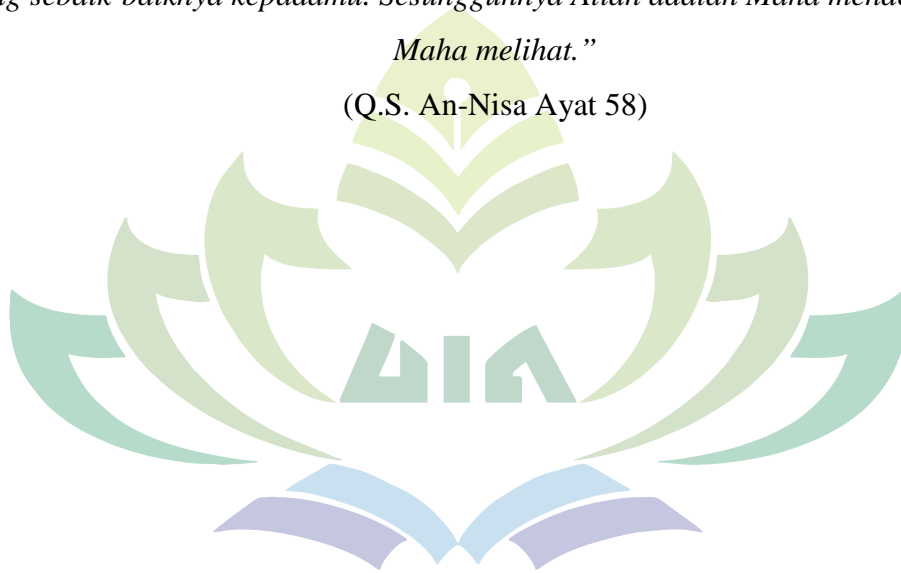


**Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP. 196210221993031002**

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”

(Q.S. An-Nisa Ayat 58)



PERSEMBAHAN

Segala syukur kepada Allah SWT dan Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW semoga kita mendapatkan syafaatnya. Atas doa dan dukungan akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat pada waktunya, oleh karena itu skripsi ini saya persembahkan:

1. Ayahanda Sutopan dan Ibunda Susanti yang dengan tulus ikhlas merelakan separuh kehidupannya untuk merawat dan mendidik saya, selalu memberikan doa dan kasih sayang serta motivasi selama ini.
2. Adik-adik saya tercinta Sintia Safrindi dan Wira Hadi Ramadhani yang selalu memberikan semangat dan dukungannya.
3. Teman seperjuangan Siyasah kelas E yang telah memberikan pengalaman dan untuk semuanya semoga selalu dilancarkan segala urusannya.
4. Teman-teman khususnya Isa Abdillah, Sofwan Asfa, M. Edward Rinaldo, Uspan Hadiansyah, Nuzul Aji Kuncoro, Epri Setiawan, dan M. Prabowo Wicaksono yang selalu ada dalam setiap waktu dan yang tak segan memberikan kritik sekaligus saran selama penulis menempuh pendidikan di UIN Raden Intan Lampung.
5. Almamater UIN Raden Intan Lampung yang saya banggakan.

RIWAYAT HIDUP

Royis Saprindo Seorang anak laki-laki yang dilahirkan di Desa Tanjung Menang Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, tepatnya pada tanggal 30 Maret 1997 yang merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Sutopan dan Ibu Susanti. Adapun riwayat pendidikan adalah sebagai berikut:

1. SDN Negeri 01 Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, lulus pada tahun 2010.
2. SMP Utama Wacana 8 Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, lulus pada tahun 2013.
3. SMK Dharma Utama Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, lulus pada tahun 2016.
4. Pada tahun 2016 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah).

Bandar Lampung, 14 Desember 2020

Yang membuat,

Royis Saprindo
1621020310

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Segala puji syukur bagi Allah SWT, Dzat Yang Maha Pengasih lagi Maha penyayang, yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi yang berjudul **“Pandangan Fiqh Siyasah terhadap Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Kampanye di luar Tahapan (Studi di Bawaslu Kota Bandar Lampung)”**. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya pada zaman Jahiliyyah menuju zaman Islamiyyah dan kita sebagai umatnya mendapatkan syafa’at kelak.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Prodi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar’iyyah) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis telah menerima banyak bimbingan, bantuan, nasihat, motivasi, serta kemudahan. Skripsi ini tidak akan selesai tepat waktu tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan banyak kontribusi dan perannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu penulis sampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang selalu tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.

3. Bapak Frenki, M.Si. Selaku Ketua Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah) yang telah memfasilitasi segala kepentingan mahasiswa.
4. Bapak Drs. Susiadi AS, M.Sos.I., dan Bapak H. Rohmat, S.Ag., M.H.I. masing-masing selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu disela-sela kesibukan, serta memberikan bimbingan, arahan dan motivasi penulis sehingga skripsi ini selesai.
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran selama penulis duduk di bangku kuliah hingga selesai.
6. Ayahanda Sutopan dan Ibunda Susanti serta kedua adik tersayang Sintia Safrindi dan Wira Hadi Ramadhani, yang tak henti-hentinya memberikan doa, semangat, dorongan dan motivasinya untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu tidak lain karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Akhirnya dengan keyakinan niat tulus ikhlas dan kerendahan hati semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu siyasah.

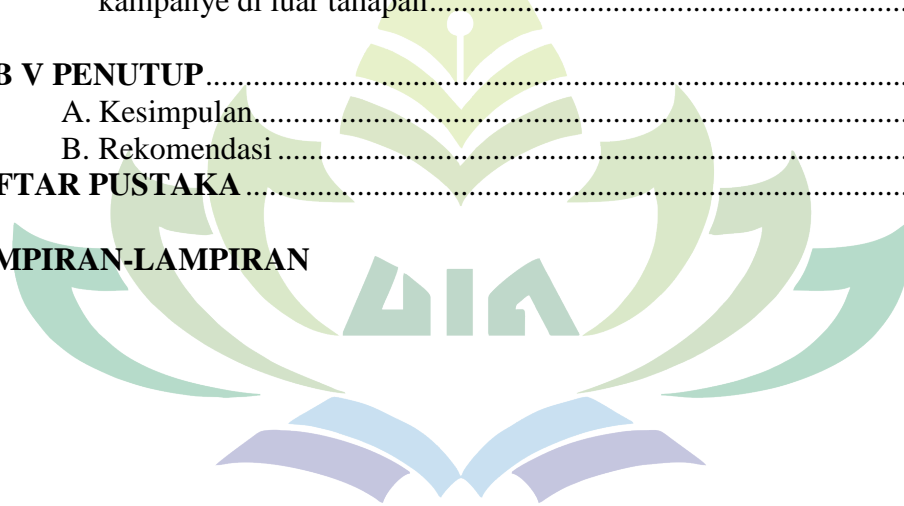
Bandar Lampung, 14 Desember 2020
Penulis

Royis Saprindo
NPM. 1621020310

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul	2
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Fokus Penelitian	6
E. Rumusan Masalah	6
F. Tujuan Penelitian	7
G. Signifikasi Penelitian	7
H. Metode Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN TEORI	14
A. Kajian Teori.....	14
1. Pengertian Fiqh.....	15
2. Pengertian Siyasah.....	15
3. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah	16
B. Wilayah Al-Hisbah.....	17
C. Proses Penyelesaian Pelanggaran Pemilu Menurut Undang-Undang Pemilu	21
1. Tindak Pidana Pemilihan Umum.....	21
2. Pengertian Pelanggaran Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal (1)	26
3. Jenis Kampanye Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 tentang Pemilihan Umum	26
D. Tinjauan Pustaka	26
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....	30
A. Gambaran Penegakan Hukum Terhadap Bawaslu Kota Bandar Lampung	30
1. Struktur Organisasi GAKKUMDU Kota Bandar Lampung	30
2. Susunan Personil GAKKUMDU Kota Bandar Lampung dari	

Unsur Pengawas Pemilu	33
3. Pola Penanganan Tindak Pidana Pemilu.....	39
4. Data Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2019 Bawaslu Kota Bandar Lampung.....	42
5. Data Rekapitulasi Dugaan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 Bawaslu Kota Bandar Lampung.....	44
B. Peran Sentra GAKKUMDU dalam menyelesaikan tindak pidana Pemilu	62
C. Data tentang Pelanggaran Kampanye di luar Tahapan	68
BAB IV ANALISIS PENELITIAN	69
A. Bagaimana peran sentra penegakan hukum terpadu dalam penanganan pelanggaran kampanye di luar tahapan	69
B. Bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap peran sentra penegakan hukum terpadu dalam penanganan pelanggaran kampanye di luar tahapan.....	70
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Rekomendasi	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul skripsi ini adalah **“Pandangan Fiqh Siyasah terhadap Peran Sentra Penegakan Hukum (GAKKUMDU) dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Kampanye di luar Tahapan (Studi di Bawaslu Kota Bandar Lampung).”**

Adapun istilah-istilah yang perlu dikaji penjelasannya sebagai berikut:

1. **Fiqh siyasah** adalah aspek hukum yang mengatur tatanan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia.¹
2. **Peran** ialah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap individu yang memiliki status atau kedudukan tertentu dalam suatu sistem. Bisa dipengaruhi dalam kondisi sosial baik dari dalam maupun dari luar.²
3. **Sentra Penegakan Hukum Terpadu** adalah badan tindak pidana Pemilu yang memiliki peran penting dalam memberantas pelanggaran tindak pidana Pemilu, yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia,

¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenamadia Group, 2014) h. 2.

² Pengertian (On-line) tersedia di : , (Def. 2). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (KBBI) Online. Diakses melalui <http://www.kamusbesar.com/> (diakses tanggal 4 januari 2020, pukul 20:00 WIB).

Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri.³

4. **Tindak Pidana Pemilu** adalah setiap orang ataupun organisasi yang dengan sengaja menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut undang-undang.⁴
5. **Kampanye di Luar Tahapan** ialah pelanggaran kampanye berupa kampanye di luar jadwal yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) ditegaskan dalam Pasal 492 Undang-Undang No 7 tahun 2017.⁵

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan yang menarik sehingga penulis terdorong untuk membahas masalah ini dalam bentuk karya ilmiah antara lain:

1. Alasan Obyektif
 - a. Minimnya waktu penyelesaian penanganan tindak pidana Pemilu yang hanya memiliki waktu 14 hari sejak laporan diterima.
 - b. Penanganan memiliki hambatan-hambatan dalam proses penyelesaian, baik dari hambatan dari segi internal dan eksternal. Peneliti mencoba

³Pengertian Sentra GAKKUMDU (Online) tersedia di [:http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh](http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh) (diakses tanggal 4 januari 2020). h. 23.

⁴Pengertian Pemilihan Umum (On-line) tersedia di: [dhttps://id.m.wikipedia.org/wiki/pemilihan-umum](https://id.m.wikipedia.org/wiki/pemilihan-umum) (diakses tanggal 4 Januari 2020, pukul 20:00 wib). h. 17.

⁵ *Ibid*, h. 16.

menggali peran sentra penegakan hukum terpadu dari sisi pendekatan Fiqh Siyasah.

2. Alasan memilih judul secara subyektif

- a. Dari aspek yang diteliti serta tersedianya literatur yang menunjang, maka sangat memungkinkan untuk dilakukan penelitian.
- b. Judul ini dipilih oleh peneliti karena masih relevan dengan disiplin ilmu yang ditekuni penulis di Fakultas Syariah Jurusan Siyasah Syar'iyah.

C. Latar Belakang Masalah

Pemilu pada tahun 2019 yang lalu terdapat laporan-laporan dugaan tindak pidana, salah satunya adalah laporan dugaan kampanye di luar tahapan yang dilakukan oleh salah satu anggota paslon DPR-RI di media masa.

Namun pada proses penyelesaiannya sentra penegakan hukum terpadu menyatakan laporan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana pemilihan umum. Unsur-unsur yang harus dipenuhi apabila ada dugaan kampanye di luar tahapan adalah adanya nomor urut, nama, slogan, logo partai, citra diri. Tetapi, sentra penegakan hukum terpadu penyelesaiannya dibatasi oleh waktu yang sudah mencapai 14 hari, jadi tidak bisa melakukan penyidikan lebih lanjut. Maka hasilnya adalah tindak pidana tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran.

Kampanye merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan Pemilu, pada proses ini peserta berupaya untuk mempromosikan dengan berbagai

macam cara seperti program kerja, dan memberikan solusi permasalahan yang pada pada masyarakat. Terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam memberantas tindak pidana Pemilu melalui pembentukan Sentra GAKKUMDU (penegakan hukum terpadu). Sentra GAKKUMDU sebagai penegak hukum terpadu mempunyai yang sangat penting untuk memberantas tindak pidana Pemilu, dalam Pasal 486 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 secara eksplisit dijelaskan bahwa pembentukan Sentra penegakan hukum terpadu untuk menyamakan pola pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu di Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Sentra penegakan hukum terpadu terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri.⁶ SENTRA GAKKUMDU dalam kewenangannya memiliki waktu 14 (hari) penyelesaian dugaan adanya pelanggaran pidana Pemilu. Sentra penegakan hukum terpadu merupakan badan yang lebih mengutamakan pencegahan, untuk itu perlu adanya sinergi yang kuat antara bawaslu dan pihak penyidik agar dapat mencegah pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilu.

⁶ Prihatmoko, *Demokratiskan Pemilu: Dari sistem sampai teknis*, (Semarang: LP3M UMWAS dan Pustaka Pelajar, 2007), h. 24.

Bawaslu dalam menerima laporan atau temuan adanya dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu, segera bertindak untuk mengumpulkan bukti-bukti yang kemudian pihak yang bersangkutan atau yang diduga melakukan pidana Pemilu untuk dimintai klarifikasi. Akan tetapi Sentra penegakan hukum terpadu dalam nya untuk memanggil pihak yang diduga melanggar tindak pidana Pemilu, status panggilan bawaslu hanya dalam bentuk undangan dan batas undangan klarifikasi maksimal dua kali dan pemanggilan untuk dimintai klarifikasi tidak bersifat memaksa.

Dalam pandangan fiqh siyasah manusia memiliki hak-hak kemanusiaan yang sama, untuk mewujudkan keadilan adalah mutlak mempersamakan manusia dihadapan hukum.⁷ Kerjasama dalam realisasi disetiap lingkungan kemanusiaan diperlukan karena ada saling ketergantungan. Kerjasama ini dilaksanakan agar saling menguntungkan dalam suasana baik dan untuk kebaikan bersama, bukan kerjasama untuk saling bermusuhan dan berbuat kejahatan.⁸

Dalam kajian fiqh siyasah yang menjadi objek dalam mengatur tatanan masyarakat dengan negara dan mengatur tatanan masyarakat dengan badan negara yang menuntun masyarakat agar terciptanya kemaslahatan dan menjauhkan kemudharatan. Sentra GAKKUMDU bisa dikatakan sebagai

⁷ Dzajuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 124

⁸ *Ibid*, h. 12

badan penegakan keadilan dalam Pemilu yang masuk dalam prinsip fiqh siyasah yang menegaskan pentingnya menegakan keadilan dalam masyarakat.

Sudah kewajiban manusia untuk menegakkan keadilan bagi setiap manusia di bumi terutama bagi orang-orang yang beriman dan setiap mukmin menjadi saksi diwajibkan menjadi saksi karena Allah dan sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya. Untuk menjadi saksi yang adil dalam hal ini bahwa setiap orang akan menjadi saksi harus terlepas dari suatu prasangka apapun dalam arti bahwa dilarang untuk belas kasih terhadap suatu kelompok atau orang tertentu kecuali dalam hal kebenaran.

Selama keadilan dapat ditegakan dengan baik, maka keseimbangan tatanan kehidupan dunia akan terpelihara dan terjaga. Sebaliknya, bila keadilan sudah tidak dapat ditegakan, maka keseimbangan tidak akan tercapai dan tatanan kehidupan duniapun mengalami guncangan.⁹ Dibentuknya Sentra penegakan hukum terpadu adalah amanah kekuasaan, Allah memerintahkan agar manusia melaksanakan amanah yang diembankan di pundaknya. Amanah merupakan sesuatu yang harus dipelihara karena kelak akan dipertanggung jawabkan kepada Allah, kekuasaan merupakan salah satu amanah yang harus dijalankan dengan baik, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Karena itu, Islam tidak dapat menoleransi segala bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan.

⁹ *Ibid*, h. 238.

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian ini terfokus pada:

1. Implementasi peran sentra penegakan hukum terpadu dalam penanganan pelanggaran tindak pidana kampanye di luar tahapan
2. Bawaslu Kota Banda Lampung
3. Pemilu tahun 2019

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran Sentra penegakan hukum terpadu dalam penanganan pelanggaran kampanye di luar tahapan?
2. Bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap peran Sentra penegakan hukum terpadu dalam penanganan pelanggaran kampanye di luar tahapan?

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran sentra penegakan hukum terpadu dalam penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu kampanye di luar tahapan.
2. Untuk mengetahui Pandangan fiqh siyasah terhadap sentra penegakan hukum terpadu dalam penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu kampanye di luar tahapan.

G. Signifikansi Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman bagaimana penanganan sentra penegakan hukum terpadu dalam penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu kampanye di luar tahapan.
2. Manfaat praktis dalam penulisan ini adalah untuk memperkaya dan memperluas keilmuan dalam bidang hukum. Dan syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan, metode penelitian juga membicarakan mengenai bagaimana cara melaksanakan penelitian untuk memperoleh dan membahas suatu penelitian.¹⁰

Metode penelitian terdiri dari:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang langsung dilakukan secara sistematis, teratur dan mendalam dengan mengangkat data atau fakta-fakta yang ada dilapangan.¹¹

2. Sifat penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif analisis merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada,

¹⁰ Susiadi, *Metode penelitian*, h. 26.

¹¹ *Ibid*, h. 12.

yaitu keadaan pada saat penelitian dilakukan. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang disusun, dijelaskan, dipresentasikan dan kemudian disimpulkan.¹²

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman tentang sentra penegakan hukum terpadu dalam penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu kampanye di luar tahapan.

3. Sumber data

Sumber data yang penulis gunakan pada penelitian ini ada dua sumber data yaitu sumber data primer dan data skunder.

a. Data primer

Data Primer adalah data utama yang digunakan peneliti untuk memperoleh jawaban atas masalah penelitian yang sedang di kaji sumber data primer adalah data utama dalam suatu penelitian digunakan sebagai pokok yang di peroleh melalui responden atau informan.¹³

Dalam penelitian ini untuk menjadi sumber data primer adalah Bawaslu Kota Bandar Lampung.

Data primer dalam studi lapangan pada penelitian ini didapatkan dari responden langsung dari hasil wawancara (*interview*) berupa pertanyaan yang di ajukan penulis pada responden serta penyelidikan

¹² *Ibid*, h. 196.

¹³ Nanang Martono, *metode penelitian sosial konsep-konsep Kunci*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada, 2015) cet. ke 1 h. 250

terhadap permasalahan penelitian, dan partisipasi artinya peneliti ikut serta dalam kegiatan masyarakat tersebut supaya lebih mendapatkan data penelitian yang lebih akurat.

Jadi data primer berupa hasil wawancara dan juga dokumen-dokumen asli yang berkaitan dengan Bawaslu Kota Bandar Lampung.

b. Data sekunder

Sedangkan data sekunder menurut Abdurahmat Fhatony adalah data yang sudah jadi, biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen, misalnya mengenai data geografis suatu daerah dan sebagainya.¹⁴

Data sekunder adalah data yang dipergunakan untuk mendukung data hasil dari wawancara yang diperoleh melalui studi pustaka yang berasal dari buku-buku, penelitian lapangan maupun dokumen-dokumen atau arsip yang berkaitan dengan pokok dan fungsi Bawaslu Kota Bandar Lampung. Sentra GAKKUMDU sebagai badan tindak pidana Pemilu.

4. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah 10 orang.

¹⁴ Syarifudin Hidayat, *metodologi penelitian*, (Bandung: Mandar maju, 2002), h.21

5. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap dan dapat mewakili populasi.¹⁵ Tujuan peneliti mengambil sampel ialah untuk memperoleh keterangan mengenai objeknya dengan jalan hanya mengamati sebagian saja dari populasi yang sangat besar jumlahnya.

Purposive Sampling Teknik ini berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut serta dengan ciri-ciri atau sifat-sifat yang ada dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Dari data populasi yang ada di Bawaslu Kota Bandar Lampung kemudian diambil menjadi 3 sampel adapun yang menjadi sample adalah:

- a. Komisioner Bawaslu Divisi Penindakan Pelanggaran 1 orang
- b. Kepolisian 1 orang

6. Teknik pengumpulan data

- a. Interview/wawancara

Interview adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden dan jawaban-jawaban responden di catat dan di rekam.¹⁶

Penulis mewawancarai responden yang bersedia untuk dijadikan responden sebagai berikut:

¹⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: pendekatan kualitatif dan kuantitatif dan R & r*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 117

¹⁶ *Ibid*, h.158.

1) Komisioner Bawaslu Kota Bandar Lampung

Koordinator Utama yang menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu..

2) Kepolisian Kota Bandar Lampung

Penyidik dari pihak kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana Pemilu.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subyek peneliti, namun melalui dokumen-dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian surat pribadi laporan notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya.¹⁷

Dokumentasi sangat besar manfaatnya karena dapat menggambarkan latar belakang masalah penelitian juga dapat dijadikan bahan pengecekan terhadap kesesuaian data dan teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data-data tertulis.¹⁸

7. Metode pengolahan data

Setelah penelitian memperoleh data yang cukup untuk penulisan skripsi maka selanjutnya penulis melakukan pengolahan dan dengan melakukan beberapa langkah sebagai berikut:

¹⁷ *Ibid, metode penelitian*, h. 170

¹⁸ *Ibid*, h. 22

a. Editing

Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah karena kemungkinan data yang masuk (*Raw data*) atau terkumpul meragukan. Tujuan *Editing* adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan dilapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat diperbaiki dan dilengkapi.¹⁹

b. Sistematisasi

Sistematisasi yaitu menempatkan data pada kerangka sistematika berdasarkan urutan masalah. Dalam hal ini yang dimaksud ialah pengelompokan data secara sistematis yang sudah diedit menurut klasifikasi dan urutan pada masalah.

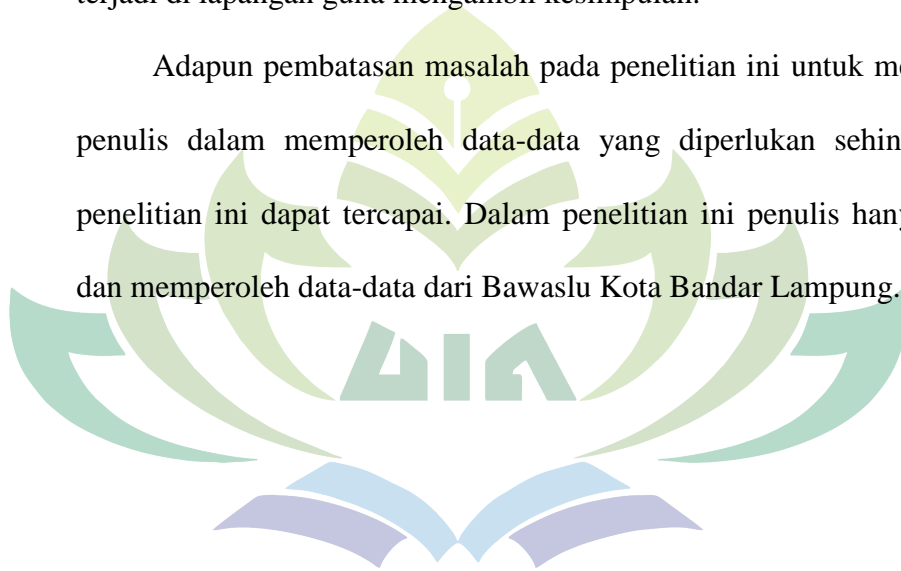
8. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menyesuaikan dengan kajian penelitian yaitu Sentra penegakan huku terpadu, dikaji dengan metode kualitatif. Maksudnya adalah bahwa data tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana Sentra penegakan hukum terpadu dalam penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu kampanye di luar tahapan, tujuannya menurut pandangan fiqh siyasah dalam hal ini untuk menegakan keadilan.

¹⁹ *Ibid*, h. 23

Selain itu penulis menggunakan metode deduktif yaitu berangkat dari fakta-fakta yang umum dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus, pendekatan deduktif ini juga dapat di gunakan dalam mengolah hasil penelitian lapangan, Penulis juga menggunakan metode induktif yaitu menarik kesimpulan bertawal dari yang khusus, lalu pada umum lalu penulis mengadakan perbandingan antara teori dengan kenyataan yang terjadi di lapangan guna mengambil kesimpulan.

Adapun pembatasan masalah pada penelitian ini untuk memudahkan penulis dalam memperoleh data-data yang diperlukan sehingga tujuan penelitian ini dapat tercapai. Dalam penelitian ini penulis hanya meneliti dan memperoleh data-data dari Bawaslu Kota Bandar Lampung.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pendataan terhadap pelapor dan saksi-saksi, pengumpulan alat bukti dan memanggil pihak terkait dugaan pelanggaran kampanye di luar tahapan, melakukan rapat koordinasi pembahasan, dan menentukan pelanggaran tersebut memenuhi unsur-unsur pelanggaran atau sebaliknya.
2. Pandangan fiqh siyasah dengan teori lembaga *wilayah al-hisbah* dimana setiap pelanggaran kasus al-hisbah dikenai hukuman ta'zir, yaitu hukuman yang tidak ditentukan jenis, kadar dan jumlahnya oleh syara', tetapi akan diserahkan sepenuhnya kepada pihak penegak hukum (*al-muhtasib*) untuk menentukan hukuman yang sesuai bagi pelaku yang telah melanggar.

B. Rekomendasi

1. Upaya dalam penanganan tindak pidana pemilihan umum (Pemilu) harus memiliki sinergi yang sama untuk menyamakan persepsi antar lembaga, dengan begitu dalam proses penyelesaian dapat secara efektif dilaksanakan.
2. Dapat memaksimalkan waktu dalam penanganan dugaan tindak pidana Pemilu, dengan laporan yang begitu banyak harus segera ditangani dengan sigap dan cepat.
3. Upaya meminta klarifikasi dari segi peraturan seharusnya dapat menjemput paksa untuk memperoleh data dan kelanjutan proses penindakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali Zainudin , *Sosiologi Hukum*, Jakarta, Sinar Gratifika, 2005.
- Bawaslu Kota Bandar Lampung, *Data Rekapitulasi Pelanggaran Pemilu Tahun 2019*.
- Cahyo Wiguno Yahnu, *Mengenal Bawaslu Kota Bandar Lampung: Analisis Proses dan Hasil Pengawasan*, (Bandar Lampung: AURA, 2019).
- Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia Hukum Islam*.
- Djalil Basiq, *Peradilan Islam Jakarta*: Bumi Aksara, 2012.
- Handitya Binov, *Peran Sentra SENTRA GAKKUMDU Dalam Penegakan Tindak Pidana Pemilu*, (Semarang: Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 4 Nomor 2, 2018).
- Hidayat Syarifudin. *metodologi penelitian*, (Bandung: Mandar maju, 2002).
- Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamami, *Fiqh Siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008).
- Iqbal Muhamad, *fiqh siyasah kontekstualisasi doktrin politik islam,,kontekstualisasi doktrin politik islam: prenamedia group*, 2014.
- Martono Nanang. *metode penelitian sosial konsep-konsep Kunci*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada, 2015).
- Muhammad al-Bahi, al-Din wa al-Dawlah min Tawjihat Al Quran al-Karim (Bairut: Dar al-fikr, 1971).
- Muhammad Teungku, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*
Prihatmoko, *Demokratiskan Pemilu: Dari sistem sampai teknis*, Semarang: LP3M UMWAS dan Pustaka Pelajar, 2007.
- Pulungan Suyuti, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).
- Santoso Topo dan Ida Budhiati, *Pemilu di Indonesia : Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*, (Jakarta : SINAR GRAFIKA, 2019).

Salim M.Arkas, *Etika Intervensi Negara Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*
 Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: pendekatan kualitatif dan kuantitatif dan R & r*, (Bandyng: Alfabeta, 2013).

Susiadi, *Metode penelitian*. Fakultas syari'ah universitas islam negeri raden intan lampung, 2014.

Susilo, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*. Bogor: Politeia.

Taimiyah Ibnu, *Tugas Negara Menurut Islam*.

Online

Definisi pandangan, <http://www.kamusbesar.com/pandangan> 04 November 2019.

Definisi , <http://www.kamusbesar.com/> 04 November 2019.

Definisi Pemilu, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/pemilihan-umum> 04 November 2019.

Sentra GAKKUMDU (On-line) tersedia di : [www. Journal.kpu.go.id](http://www.Journal.kpu.go.id) (diakses tanggal 23 maret 2020).

Jurnal

Al-Adalah: Asni, *Peran Peradilan Islam dalam Penegakan Hukum Islam di Kesultanan Butin*, 2017.

Wawancara

Yani Muhammad, *Anggota Personil Sentra GAKKUMDU Kota Bandar Lampung*, wawancara dengan penulis tanggal 1 Oktober 2020.

Wiguno Sanyoto Yahnu, *(Ketua Koordinasi Sentra GAKKUMDU Kordiv. Penindakan Pelanggaran)*. Wawancara dengan penulis, Kantor Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung, Lampung, 1 Oktober 2020.